

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja kabupaten/kota yang berada di provinsi Jawa Timur belum optimal atau belum mencapai target. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya ketergantungan sebagian besar pemerintah kabupaten/kota terhadap bantuan pihak ekstern baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk membiayai kegiatannya. Ini berarti bahwa keikutsertaan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yaitu melalui pembayaran pajak dan retribusi masih rendah yang berarti sebagian besar pemerintah kabupaten/kota masyarakatnya belum sejahtera sebab kurang mampu membayar pajak dan retribusi. Selain itu, belanja pembangunan yang bertujuan untuk membangun sarana maupun prasarana yang secara langsung menunjang pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran belum optimal dalam pelaksanaannya sebab dana yang dialokasikan sangat minim untuk belanja pembangunan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota disarankan harus lebih memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah agar dapat meningkatkan PAD sehingga mengurangi ketergantungan dana dari pihak ekstern yaitu pemerintah pusat maupun provinsi.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota disarankan agar pengalokasian dana untuk belanja rutin dan belanja pembangunan harus seimbang sehingga tidak terjadi gap antara belanja operasional/rutin dengan belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana yang nantinya mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- c. Pemerintah provinsi disarankan agar lebih selektif di dalam memilih daerah-daerah yang akan dimekarkan menjadi kabupaten/kota sebab banyak daerah yang belum bisa mandiri.
- d. Bagi peneliti berikutnya, masih banyak rasio keuangan daerah yang dapat digunakan untuk dapat menilai kinerja pemerintah di dalam merealisasikan uang rakyat sehingga diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I., 2005, *Rancangan Sistem Kesejahteraan Sosial (Social Security System) Di Indonesia Dalam Perspektif Akuntansi*, Universitas Gajah Mada: SNA8.
- Biro Pusat Statistik, 2009, *Indeks Kemiskinan, Indeks Pengangguran, Kabupaten/Kota Dalam Angka*, BPS Provinsi Jawa Timur.
- Halim, A., 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, A., 2007, *Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran*, Madura: Program Pascasarjana UPNV Jatim.
- Mahmudi., 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo., 2002, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, <http://www.ekonomirakyat.org>.
- Mubyarto., 2002, *Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah Dalam Era Otonomi Daerah*, <http://www.ekonomirakyat.org>.
- Pengertian Pengangguran dan Jenis/Macam Pengangguran: Friksional, Struktural, Musiman, dan Siklikal, 12 Desember, 2007, <http://www.organisasi.org.mht>.
- Priyatno, D., 2008, *Mandiri Belajar SPSS, Untuk Analisis Data dan Uji Statistik*, Yogyakarta: MediaKom.
- Sahdan, G., 2002, *Menanggulangi Kemiskinan Desa*, <http://www.ekonomirakyat.org>.
- Sopanah, 2007., *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berperspektif Gender*, Universitas Widyagama Malang: Program Pascasarjana UPNV Jatim.
- Tim Fokusmedia., 2005, *Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005)*, Bandung: FOKUSMEDIA.
- Wibowo, S.M., 2007, *Dampak APBD Terhadap Ekonomi Lokal*, Litbang DEPDAAGRI: Program Pascasarjana UPNV Jatim.